



Pengaruh Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Terdaftar Di BEI

Ernawati¹, Darwis Lannai², Asriani Junaid³

¹ Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar.

^{2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia, Makassar.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk : (1) menguji pengaruh proporsi komisaris independen terhadap penghindaran pajak; (2) menguji pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak; (3) menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak; (4) menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak; (5) menguji pengaruh pengungkapan CSR terhadap penghindaran pajak. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari laporan perusahaan manufaktur dari tahun 2015-2018. Data diperoleh dari Bursa Efek Indonesia yang dapat diakses di website resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) serta website perusahaan dari perusahaan terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) kepemilikan proporsi komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak; (2) kualitas audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak; (3) kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak; (4) kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak; (5) CSR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: Proporsi Komisaris Independen, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Corporate Social Responsibility, Penghindaran Pajak.

1. Pendahuluan

Perkembangan jasa pelayanan maskapai penerbangan dari tahun ke tahun semakin menjadi perhatian masyarakat luas. Hal ini dapat dilihat dari ketatnya persaingan pelayanan, harga dan promosi yang ditawarkan dari berbagai maskapai penerbangan. Daya tarik industri penerbangan yang menggeluti bisnis tersebut. Penekanan terhadap beban pajak, ada yang diperbolehkan (sesuai dengan ketentuan pajak) dan ada yang tidak diperbolehkan (tidak sesuai dengan ketentuan pajak). Para pakar pajak berpendapat bahwa penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan tindakan yang diperbolehkan dalam rangka menekan beban pajak, sedangkan tindakan penggelapan pajak (tax evasion) merupakan tindakan yang melanggar undang-undang pajak. Penghindaran pajak saat ini menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh fiskus, karena kegiatan ini mungkin saja dapat menjurus pada upaya penggelapan pajak. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara. Dari sudut pandang kebijakan pajak, pembiaran terhadap praktik pembiaran pajak dapat mengakibatkan ketidakadilan dan berkurangnya efisiensi dari suatu sistem perpajakan. Penghindaran pajak umumnya dilakukan melalui skema-skema transaksi yang kompleks yang dirancang secara sistematis dan umumnya hanya dapat dilakukan oleh korporasi besar. Hal inilah yang menimbulkan persepsi ketidakadilan, dimana korporasi besar tampaknya membayar pajak yang lebih sedikit. Hal ini pada ujungnya dapat menimbulkan keengganan wajib pajak yang lain untuk membayar pajak yang berakibat pada inefektifitas sistem perpajakan (Winarsih dan Kusufi, 2014).

Salah satu prinsip utama untuk membuat kebijakan CG adalah transparansi. Transparansi merupakan elemen untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis. Perusahaan harus

menyediakan informasi yang mudah dipahami dan mudah di akses oleh pemangku kepentingan. Transparansi dapat diukur melalui kualitas audit.

Tabel 1: Rumusan dan Tujuan Penelitian

Rumusan Masalah	Tujuan Penelitian
1. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak?	1. Menguji pengaruh proporsi komisaris independen terhadap penghindaran pajak.
2. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?	2. Menguji pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak.
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?	3. Menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.
4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap dan penghindaran pajak ?	4. Menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap dan penghindaran pajak.
5. Apakah pengungkapan CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?	5. Menguji pengaruh pengungkapan CSR terhadap penghindaran pajak.

2. Tinjauan Pustaka

Freeman (1984) mendefinisikan stakeholder sebagai any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the organization's objectives. Terjemahan bebasnya adalah sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Stakeholder juga dapat didefinisikan stakeholder sebagai orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan tertentu. . Yunus Handoko (2014) mengatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholders sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Semakin powerful stakeholder, maka semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan stakeholdernya. Salah satu teori yang melandasi *corporate social responsibility* adalah teori legitimasi. Teori legitimasi dan teori *stakeholder* merupakan perspektif teori yang berada dalam kerangka teori ekonomi politik. Menurut Gray *at al* dalam Ibnu Dipraja (2014), pengaruh masyarakat luas dapat menentukan alokasi sumber keuangan dan sumber ekonomi lainnya, perusahaan cenderung menggunakan kinerja berbasis lingkungan dan pengungkapan informasi lingkungan untuk membenarkan atau melegitimasi aktivitas perusahaan dimata masyarakat. Edoardus Satya Adhiwardana dan Daljono (2013) menyatakan bahwa teori legitimasi memfokuskan pada kewajiban perusahaan untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dalam bingkai dan norma yang sesuai dalam lingkungan masyarakat dimana perusahaan itu berdiri, dimana perusahaan memastikan aktivitas yang dilakukan diterima sebagai sesuatu yang sah. Teori legitimasi dinegara berkembang meliputi dua hal yaitu: Kapabilitas dalam menempatkan motif maksimalisasi keuntungan membuat gambaran lebih jelas tentang motivasi perusahaan memperbesar tanggung jawab sosialnya. Legitimasi organisasi dapat memasukkan faktor budaya yang membentuk tekanan institusi yang berbeda dalam konteks yang berbeda.

Sukrisno Agoes (2006) mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mencoba untuk mengembangkan beberapa prinsip yang dapat dijadikan acuan baik oleh pemerintah maupun para pelaku bisnis dalam mengatur mekanisme hubungan antar pemangku kepentingan tersebut. Prinsip-prinsip OECD (dalam Sukrisno Agoes, 2006) mencakup 5 (lima) bidang utama, yaitu : hak-hak para pemegang saham (stockholders) dan perlindungannya; peran para karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) lainnya; pengungkapan (disclosur) yang akurat dan tepat waktu;

transparansi terkait dengan struktur dan operasi perusahaan; serta tanggung jawab dewan (dewan komisaris dan dewan direksi) terhadap perusahaan, pemegang saham, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Secara ringkas, prinsip-prinsip tersebut dapat dirangkum sebagai berikut: Perlakuan yang setara antar pemangku kepentingan (fairness). Transparansi (transparency). Akuntabilitas (accountability). Responsibilitas (responsibility)

Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, dikatakan alasan pencabutan UU No. 1 Tahun 1995 untuk diganti dengan UU No. 40 Tahun 2007. Pertimbangan tersebut antara lain karena adanya perubahan dan perkembangan yang cepat berkaitan dengan teknologi, ekonomi, harapan masyarakat tentang perlunya peningkatan pelayanan dan kepastian hukum, kesadaran sosial dan lingkungan, serta tuntutan pengelolaan usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance). Amila Dyan Maraya dan Reni Yendrawari (2016) menyebutkan paling tidak diperlukan empat organ untuk melengkapi penerapan good corporate governance, yaitu:

- 1) Komisari Independen. Komisaris independen sebagai pihak yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain harus secara proaktif mengupayakan agar dewan komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dan praktik good corporate governance diterapkan dengan baik, mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku serta menerapkan nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya (Komite Nasional Kebijakan Governance 2006).
- 2) Kualitas Audit. Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 121 memungkinkan Dewan Komisaris untuk membentuk komite tertentu yang dianggap perlu untuk membantu tugas pengawasan yang diperlukan. Salah satu komite tambahan yang kini banyak muncul untuk membantu fungsi Dewan Komisaris adalah Komite Audit.
- 3) Kepemilikan Institusional. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah dua mekanisme corporate governance yang dapat mengendalikan masalah keagenan. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya. Institusi-institusi tersebut memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas kinerja manajemen (Ngadiman dan Puspitasari 2014).
- 4) Kepemilikan Manajerial. Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh perusahaan (direksi, komisaris, manajer, maupun karyawan) yang diukur dengan jumlah persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen.

Perusahaan merupakan salah satu sendi kehidupan masyarakat modern, karena perusahaan merupakan salah satu pusat kegiatan manusia guna memenuhi kehidupannya. Selain itu, perusahaan juga sebagai salah satu sumber pendapatan negara melalui pajak dan wadah tenaga kerja. Menurut Dwi Tuti Muryati (2007), perusahaan merupakan lembaga yang secara sadar didirikan untuk melakukan kegiatan yang terus-menerus untuk mendayagunakan sumber daya alam dan sumber daya manusia sehingga menjadi barang dan jasa yang bermanfaat secara ekonomis. Menurut Sri Rejeki Hartono (2007), aktivitas menjalankan perusahaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dalam pengertian yang tidak terputus-putus, kegiatan tersebut dilakukan secara terang-terangan dalam pengertian sah/legal, dan dalam rangka untuk memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Edi Suharto (2010) menyatakan bahwa CSR diterapkan kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam konteks ekonomi global, nasional maupun lokal. Komitmen dan aktivitas CSR pada intinya merujuk pada aspek-aspek perilaku perusahaan, termasuk program dan kebijakan yang menyangkut dua elemen kunci, yaitu:

- 1) Good Corporate Governance: etika bisnis, manajemen sumber daya manusia, jaminan sosial bagi pegawai, serta kesehatan dan keselamatan kerja.
- 2) Good Corporate Social Responsibility: pelestarian lingkungan, pengembangan masyarakat (community development), perlindungan hak asasi manusia, perlindungan konsumen, relasi dengan pemasok, dan penghormatan terhadap hak-hak pemangku kepentingan lainnya.

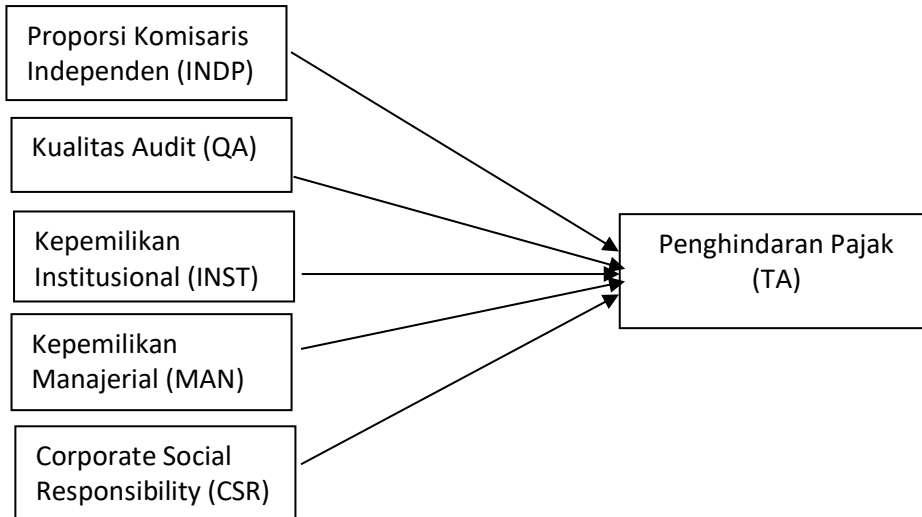
Menurut Susanto dalam Busyra Azheri (2012), CSR dilihat dari segi implementasinya dapat dibagi atas tiga tahapan atau kategori yaitu:

- 1) Social obligation, pada kategori ini implementasi CSR sekadar untuk memenuhi persyaratan minimal yang ditentukan oleh pemerintah dan ada kesan terpaksa.
- 2) Social reaction, pada tahap ini sudah muncul kesadaran oleh perusahaan akan pentingnya CSR, namun tetap saja memiliki kelemahan karena dilakukan setelah masyarakat mengalami eksternalitas yang cukup lama tanpa ada kebijakan dari perusahaan.
- 3) Social response, pada kategori ini masyarakat dan perusahaan mencari peluang timbulnya kebaikan ditengah masyarakat. Kategori ini lebih dari sekadar pendekatan ad hoc, charity, atau tekanan pihak luar. Ia lebih merupakan sebuah dorongan internal (internal driven) dan jalinan kemitraan (partnership).

Irham Fahmi (2014) mengatakan bahwa manfaat CSR bagi perusahaan antara lain: Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra perusahaan; Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial; Mereduksi resiko bisnis perusahaan; Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha; Membuka peluang pasar yang lebih luas; Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah; Memperbaiki hubungan dengan stakeholders; Memperbaiki hubungan dengan regulator; Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan; Peluang mendapatkan penghargaan. Implementasi CSR membutuhkan pengungkapan atau pelaporan yang berguna dalam menginformasikan dan mengomunikasikan sekaligus bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders. Untuk itu, pengungkapan CSR begitu strategis dalam menginisiasi opini stakeholder agar meningkatkan reputasi perusahaan secara nyata (Dwi Kartini, 2013) Menurut Sembiring dalam Rahmawati (2012), pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yang sering juga disebut sebagai social disclosure, corporate social reporting, social accounting, merupakan proses pengomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Pengungkapan sosial sebagai suatu pelaporan atau penyampaian informasi kepada stakeholders mengenai segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan sosialnya. Hasil penelitian di berbagai negara membuktikan bahwa laporan tahunan (annual report) merupakan media yang tepat untuk menyampaikan tanggung jawab sosial perusahaan.

Kerangka Konseptual

Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut. Yunus Handoko (2014) mengatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholders sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Semakin powerful stakeholder, maka semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan stakeholdernya. Variabel yang ingin dikaji peneliti terkait pengaruhnya terhadap penghindaran pajak diantaranya proporsi komisaris independen, kualitas audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan corporate social responsibility. Permasalahan yang hendak dikaji peneliti yaitu apakah corporate governance yang diproksikan dengan proporsi komisaris independen, kualitas audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial serta corporate social responsibility berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan maka disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Hipotesis

- H₁ :Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
- H₂ :Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
- H₃ :Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
- H₄ :Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
- H₅ :Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian penjelasan (*explanation research*) dengan pendekatan kuantitatif, karena dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penjelasan (*explanatory*). Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur disektor industri kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 bulan yaitu antara bulan Juli sampai dengan bulan September 2019. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari laporan perusahaan manufaktur dari tahun 2015-2018. Data dapat diperoleh dari Bursa Efek Indonesia yang dapat diakses di website resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) serta website perusahaan dari perusahaan terkait. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2018. Perusahaan manufaktur dipilih karena perusahaan manufaktur jumlahnya lebih banyak di Indonesia dan diharapkan mampu menggambarkan keadaan perusahaan di Indonesia serta meminimalisir bias efek industri. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive random sampling. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan regresi linier berganda. Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat lolos uji asumsi klasik. Syarat-syarat tersebut harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji Multikolinearitas, Uji Heterokedastisitas dan uji Autokorelasi menunjukkan bahwa regresi berganda yang diestimasi telah memenuhi syarat asumsi-asumsi klasik sehingga diharapkan hasilnya akan baik dalam menganalisis

1) Pengujian Hipotesis secara Simultan (Uji-F)

Tabel 1. Hasil Uji Hipotesis Simultan ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	24181.261	5	4836.252	6.979	.000 ^b
Residual	18016.418	26	692.939		
Total	42197.679	31			

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

b. Predictors: (Constant), CSR, Kepemilikan Institusional, LN Kualitas Audit, Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial

Sumber: Data Diolah, 2019

Tabel 6 menunjukkan bahwa tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa komposisi Komisaris Independen, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan CSR secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh terhadap Penghindaran Pajak, dengan probabilitas 0,002. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari nilai signifikan 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Penghindaran Pajak.

2) Pengujian Hipotesis Secara Parsial

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis Parsial Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	711.012	204.421		3.478	.002
1 Proporsi Komisaris Independen	-1.865	.680	-.393	-2.741	.011
Ln Kualitas Audit	-326.738	129.992	-.450	-2.514	.018
Kepemilikan Institusional	-1.737	.367	-1.324	-4.733	.000
Kepemilikan Manajerial	-2.160	.532	-1.326	-4.062	.000
CSR	-.790	.353	-.381	-2.237	.034

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Data Diolah, 2019

Melalui statistik uji-t yang terdiri dari Proporsi Komisaris Independen(X1), Kualitas Audit(X2), Kepemilikan Institusional (X3), Kepemilikan Manajerial (X4) dan CSR (X5), dapat diketahui secara parsial pengaruhnya terhadap Penghindaran Pajak(Y).

- 1) Pengujian Hipotesis Pertama (H1), Tabel diatas menunjukkan bahwa Proporsi Komisaris Independen memiliki tingkat signifikan sebesar 0,011 yaitu lebih kecil dari 0,05. Nilai t yang bernilai -2,741 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat negatif terhadap variabel dependen. Hal ini berarti H1diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Proporsi Komisaris Independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak.
- 2) Pengujian Hipotesis Kedua (H2). Tabel diatas menunjukkan bahwa kualitas audit memiliki tingkat signifikan sebesar 0,018 yaitu lebih kecil dari 0,05. Nilai t yang bernilai -2,514 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat negatif terhadap variabel dependen. Hal ini berarti H2diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Kualitas Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak.
- 3) Pengujian Hipotesis Ketiga (H3). Tabel diatas menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Nilai t yang bernilai -4,733 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat negatif terhadap variabel dependen. Hal ini berarti H3diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

- 4) Pengujian Hipotesis Keempat (H2). Tabel diatas menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,005. Nilai t yang bernilai -4,062 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat negatif terhadap variabel dependen. Hal ini berarti H4 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak.
- 5) Pengujian Hipotesis Kelima (H5). Tabel diatas menunjukkan bahwa CSR memiliki tingkat signifikan sebesar 0,034 yaitu lebih kecil dari 0,05. Nilai t yang bernilai -2,237 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat negatif terhadap variabel dependen. Hal ini berarti H5 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa CSR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Tabel 3. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.757 ^a	.573	.491	26.32374	1.433
a. Predictors: (Constant), CSR, Kepemilikan Instiusional, LN Kualitas Audit, Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial					
b. Dependent Variable: Tax Avoidance					

Sumber: Data Diolah, 2019

Dari tabel di atas terdapat angka R sebesar 0,757 yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penghindaran Pajak dengan kelima variabel independennya kuat, karena berada di defenisi kuat yang angkanya diatas 0,61 - 0,8. Sedangkan nilai R square sebesar 0,573 atau 57,3% ini menunjukkan bahwa variabel Penghindaran Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Proporsi Komisaris Independen, Kualitas Audit, Kepemilikan Instiusional, Kepemilikan Manajerial dan CSR sebesar 57,3% sedangkan sisanya 42,7% dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

b. Pembahasan

1. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen maka akan semakin kecil penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan banyaknya komisaris independen, maka peran dalam fungsi monitoring terhadap tindakan-tindakan manajer akan berjalan dengan baik, sehingga perusahaan bisa menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang akan menghasilkan informasi keuangan perusahaan yang berkualitas. Hasil ini berarti bahwa besar kecilnya proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris akan mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak. Penelitian ini sesuai dengan teori stakeholder (Freeman, 1984) yang mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut. Yunus Handoko (2014) mengatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholders sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Semakin powerful stakeholder, maka semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan stakeholdernya. Jadi dengan adanya komisaris independen didalam perusahaan, maka pemantauan terhadap tindakan-tindakan manajer akan berjalan dengan baik, sehingga tindakan-tindakan perusahaan seperti tax avoidance akan terhindarkan. Penelitian ini didukung oleh penelitian Lanis dan Richardson (2011) dalam Selly Septiani dan Dwi Martani (2013) yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki komisaris independen, jumlah outside board of director yang besar melakukan praktik manajemen laba dan manajemen pajak yang lebih rendah. Apabila jumlah komisaris independen pada dewan komisaris semakin banyak maka akan semakin baik karena komisaris independen dapat memenuhi peran mereka di dalam fungsi monitoring terhadap tindakan-tindakan para direktur. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen yang lebih tinggi memungkinkan mereka

memastikan bahwa tindakan manajemen telah sesuai dan bukan hanya sekedar memenuhi ketentuan formal perusahaan yang tidak memiliki hubungan dengan internal perusahaan.

2. Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin baik kualitas audit yang dihasilkan perusahaan maka akan semakin menurun penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Laporan keuangan yang go public, terlebih dahulu harus di audit oleh auditor yang memiliki kompetensi dan reputasi yang baik, auditor akan memberikan opini sesuai dengan laporan yang dibuat oleh perusahaan. Jadi laporan keuangan yang diaudit akan memiliki tingkat kecurangan yang lebih kecil dari pada laporan keuangan yang belum di audit. Penelitian ini sesuai dengan teori stakeholder yang mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut. Dukungan ini berupa penggunaan jasa auditor untuk menilai laporan keuangan yang dibuat oleh manajer, agar terhindar dari kecurangan-kecurangan dan memberikan opini yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak berkepentingan. Penelitian ini didukung oleh penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) menjelaskan bahwa laporan keuangan yang diaudit memiliki tingkat kecurangan dalam aktivitas perpajakan yang lebih rendah. Apabila kualitas audit baik, maka penghindaran pajak semakin kecil karena laporan keuangan yang memiliki kualitas audit yang baik akan bebas dari kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas audit merupakan salah satu potret perusahaan, sehingga merefleksikan nilai perusahaan tersebut. Kualitas audit mampu meningkatkan kualitas laba perusahaan melalui monitoring yang membatasi perilaku pemilihan prosedur akuntansi yang agresif dalam pengelolaan laba perusahaan. Hal tersebut berakibat positif pada peningkatan kualitas komponen informasi akuntansi. Selanjutnya, peningkatan kualitas informasi laba ke tingkat wajar akan mendorong perusahaan mengurangi tindakan penghindaran pajak melalui pelaporan penghasilan kena pajak yang wajar pula.

3. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin besar kepemilikan institusional yang harus dimiliki perusahaan maka akan semakin menurun penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Pihak institusi akan melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen, sehingga pihak manajemen akan menjalankan operasi perusahaan tanpa melakukan tindakan-tindakan kecurangan. Penelitian ini sesuai dengan teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut. Dukungan ini berupa, pengawasan kepada pihak manajemen agar pembuatan laporan keuangan tidak melanggar prinsip-prinsip akuntansi dan tidak terdapat kecurangan-kecurangan guna untuk keberlangsungan perusahaan. Penelitian ini didukung oleh Penelitian Ngadiman dan Puspitasari (2014) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

4. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin besar kepemilikan manajerial yang harus dimiliki perusahaan maka akan semakin menurun penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Pihak manajemen cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan karena akan berdampak langsung pada dirinya selaku pemegang saham. Sehingga dengan bertambahnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial dapat menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, begitupun sebaliknya. Penyebabnya adalah kepemilikan saham oleh manajer akan cenderung membuat manajer mempertimbangkan kelangsungan perusahaannya sehingga manajer tidak akan menghendaki usahanya diperiksa terkait permasalahan perpajakan. Penelitian ini

sesuai dengan teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut. Dukungan ini berupa, pembuatan laporan keuangan yang tidak melanggar prinsip-prinsip akuntansi dan tidak terdapat kecurangan-kecurangan guna untuk keberlangsungan perusahaan. Penelitian ini didukung oleh Penelitian Minnick dan Noga (2010) menunjukkan bahwa insentif direksi merupakan faktor penting dari agresivitas pajak dan manajemen laba dalam konteks Amerika. Oleh karena itu, kepemilikan oleh anggota dewan perusahaan menciptakan insentif untuk melindungi kepentingan keuangan mereka dip perusahaan.

5. Pengaruh CSR terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa profitabilitas yang diprosikan melalui CSR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi CSR maka penghindaran pajak akan semakin menurun. Dengan pengungkapan CSR, maka akan memberikan reputasi yang baik kepada masyarakat ataupun kepada investor dan pemerintah, sehingga tindakan kecurangan seperti penghindaran pajak akan terhindarkan. Pada perusahaan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, salah satu program CSR yang menjadi fokus Perseroan adalah tanggung jawab lingkungan hidup yang merefleksikan kesadaran semua pihak di Perseroan akan perlunya menjaga lingkungan. Perseroan senantiasa bekerja untuk mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya mengelola lingkungan secara arif. Perseroan merujuk ke ISO 14001 Environmental Management System, sebuah standar internasional untuk Sistem Pengelolaan Lingkungan (SPL). Sebagai wujud konsentrasi terhadap lingkungan, Perseroan juga menerapkan kebijakan dan melakukan kegiatan dan program yang dapat membantu perbaikan ekosistem lingkungan. Dalam menjalankan operasi bisnisnya, Perseroan senantiasa mengusahakan pemakaian material dan energi ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Sehubungan dengan itu, Perseroan berpedoman pada Pelaksanaan CSR Bidang Lingkungan untuk menerapkan program CSR Bidang Lingkungan secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan. Petunjuk pelaksanaan tersebut mencakup beberapa poin penting terkait pemakaian material dan energi ramah lingkungan dan dapat didaur ulang yang diterapkan Perseroan melalui kegiatan berikut. Dalam melakukan pengelolaan limbah baik dari kegiatan produksi maupun kegiatan pendukung lainnya, Perseroan menerapkan prinsip 3R yaitu Reduce (pengurangan limbah), Reuse (penggunaan kembali) dan Recycle (daur ulang), serta melakukan pembuangan yang aman. Salah satu contoh penerapan 3R adalah dengan mengimplementasikan Program Alternative Fuel Recovery. Perseroan bekerja bersama mitra yang membantu memproses limbah minyak produksi Perseroan agar dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Selain itu dalam pengembangan social kemasyarakatan, Perseroan membentuk dan membina dua koperasi di Desa Mangunreja dan Desa Gunung Sugih. Dua koperasi ini dijalankan oleh pelaku usaha mikro dan kecil yang dulunya adalah mitra binaan Perseroan dalam program Kemitraan Pinjaman tanpa agunan. Di awal tahun 2017, Perseroan bekerjasama dengan Yayasan Relawan Kampung Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial untuk memperbaiki jembatan gantung di Desa Sukajaya, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Jembatan yang telah rusak dan terbenkakai selama tiga tahun tersebut kini sudah dapat dilewati dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kelancaran mobilitas sehari-hari.

Legitimacy theory mengungkapkan bahwa perusahaan secara kontinyu berusaha untuk bertindak sesuai dengan batas-batas dan norma-norma dalam masyarakat, atas usahanya tersebut perusahaan berusaha agar aktivitasnya diterima menurut persepsi pihak eksternal (Deegan, 2000 dalam Febrina dan Suaryana, 2011). Legitimasi didapatkan jika apa yang dijalankan oleh perusahaan telah selaras dengan apa yang juga diinginkan oleh masyarakat. Perusahaan yang melakukan pengungkapan CSR dari penggunaan modal yang dimiliki perusahaan diharapkan akan menurunkan tingkat kecurangan. Hubungan ini yang akan mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan CSR dari penggunaan sebagian modal yang dimilikinya sehingga dengan tujuan menurunkan terjadinya penghindaran pajak (kecurangan). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Watson (2011) dalam penelitiannya membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki pengungkapan CSR yang tinggi cenderung kurang agresif dalam praktek penghindaran pajaknya.

5. Kesimpulan

Simpulan dari penelitian mengenai analisis pengaruh proporsi komisaris independen, kualitas audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan CSR terhadap penghindaran pajak pada perusahaan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mengambil data dari tahun 2015-2018 sebagai berikut:

1. Kepemilikan proporsi komisaris independen mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak yang memiliki arti bahwa semakin besar proporsi komisaris independen, maka penghindaran pajak akan semakin kecil.
2. Kualitas audit mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak yang berarti bahwa semakin berkualitas audit terhadap perusahaan, maka semakin kecil penghindaran pajak.
3. Kepemilikan institusional mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan institusional maka penghindaran pajak akan semakin kecil.
4. Kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan manajerial maka penghindaran pajak akan semakin kecil.
5. CSR mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tanggung jawab sosial perusahaan maka penghindaran pajak akan semakin kecil.

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapat, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: Bagi para investor, jika ingin berinvestasi berupaya untuk mendapatkan informasi yang sedini mungkin agar tidak terjadi informasi asimetris dalam pengambilan keputusan investasi. Bagi Perusahaan, sebaiknya memberikan keterbukaan informasi tentang laporan keuangannya agar para investor dapat mengakses dengan mudah informasi yang dibutuhkan dan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak investor dan perusahaan sendiri. Disisi lain, Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan sektor kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Diharapkan untuk dapat menggunakan perusahaan dengan sektor yang berbeda. Lalu selanjutnya, dalam penelitian ini, nilai R² (Determinan) sebesar 0,573 atau 57,3% ini menunjukkan bahwa variabel penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variabel proporsi komisaris independen, kualitas audit, Kepemilikan Institusional, kepemilikan manajerial dan CSR sebesar 57,3% sedangkan sisanya 42,7% dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini. Diharapkan untuk dapat menggunakan variabel lain atau menambah variabel yang sudah ada.

Daftar Pustaka

- Adhiwardana, S. E., dan Daljono. 2013. Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Kepemilikan Asing Terhadap Kinerja Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 2 No. 2.
- Agoes, S, dan I.C Ardana. 2009. *Etika Bisnis dan Profesi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Aida, N. (2021). Work Experience, Obedience Pressure and Task Complexity on Audit Judgment. *Golden Ratio of Auditing Research*, 1(2), 61-69.
- Annisa, N. A., dan L. Kurniasih. 2012. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing* 6 (2):35-169.
- Arthana, R. 2011. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Indeks LQ45 Bursa Saham Indonesia, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis*.
- BAPEPAM. 2012. Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Nomor: kep-431/bl/2012 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik Jakarta.
- BusyraAzheri. 2012. *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Brian, I, dan D. Martani. 2014. Analisis Pengaruh Penghindaran Pajak dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Waktu Pengumuman Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi XVII, Lombok, Indonesia, 24-27 September*.

- Dewi, N. K, dan I. K Jati. 2014. Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 6 (2): 249-260.
- Edi Suharto. 2010. CSR dan Comdev; Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi. Bandung. Arfabeta.
- Freeman, R. E. 1984. Strategic Management: A Stakeholders Approach. Boston: Fitman.
- Ghozali, I. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan IBM Program SPSS 19. Edisi ke-5. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Global Reporting Initiative: Pedoman Keberlanjutan G4; Prinsip-Prinsip Pelaporan dan Pengungkapan Standar. Diakses dari www.globalreporting.org.
- Hanum, H. R, dan Zulaikha. 2013. Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris pada BUMN yang Terdaftar di BEI 2009-2011).Diponegoro Journal of Accounting 2 (2): 1-10.
- Hatane. S., Elianto. W. 2008. Corporate Social Responsibility, Purchase Intention dan Corporate Image Pada Restoran di Surabaya dari Perspektif Pelanggan. Jurnal Manajemen Pemasaran, Vol, 3 No. 1. April.
- Hidayanti, N. N, dan S. Murni. 2009. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Earnings Responce Coefficient Pada Perusahaan High Profile. Jurnal Bisnis dan Akuntansi 11 (1): 1 -8.
- Ibnu Dipraja. 2014. Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan. Dian Nusantara University Journal of Accounting.
- Irham Fahmi. 2014. Etika Bisnis: Teori, Kasus, dan Solusi. Bandung: Alfabeta.
- Jensen, M. C., dan W. H. Meckling. 1976. Theory Of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs, and Ownership Structure. Journal Of Financial Economic 3 (4): 235-249.
- Kartini, D. 2013. Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia. Cetakan Kedua. Bandung: RefikaAditama.
- Kemenkeu. 2016. Kemenkeu. Diakses pada tanggal 20 Mei 2019, dari www.kemenkeu.go.id
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Jakarta.
- Maraya, D, A., dan R. Yendrawati. 2016. Pengaruh Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Disclosure Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Tambang dan CPO. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia 20 (2) Desember.
- Marzully, N., dan Denies, P. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility .Jurnai Nominal, Vol. 1, No. 1.
- Minnick, K., dan T. Noga. 2010. Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management ?. Journal Of Corporate Finance 16 (5): 703-708.
- Ngadiman, dan C. Puspitasari. 2014. Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. Jurnal Akuntansi 8 (3):408-421.
- Pohan, C. A. 2011. Optimizing Corporate Tax Management. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prakosa, K. B. 2014. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi 17, Lombok, Indonesia, 24-27 September.
- Rahmawati. 2012. Teori Akuntansi Keuangan: Dilengkapi Dengan Hasil Penelitian Empiris di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rudianto, B., dan M. Famiola. 2007. Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia. Bandung: Rekayasa Sains Bandung.
- Sartori, N. 2010. Effect Of Strategic Tax Behaviours On Corporate Governance. Diakses dari www.ssrn.com
- Septiani, S., dan D. Martani, 2013. Analisis Corporate Governance dan Reformasi Perpajakan Terhadap Manajemen Laba dan Manajemen Pajak Pada Perusahaan Terdaftar Di BEI.
- Siregar, Sylvia., dan Utama, Siddharta. 2006. Pengaruh Struktur Kepemilikan Ukuran Perusahaan dan Praktek Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Laba (Earnings Management). Jurnai Riset Akuntansi Indonesia 9 : 307-326.
- Suwardjono. 2013. Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Tjager, I. N., Alijoyo, F. A., Djemat, H. R, & Sembodo, B. 2003. Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia. Jakarta: PT. Prenhallindo.

- Totok Mardikanto. 2014. CSR (Corporate Social Responsibility: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan). Bandung: Alfabeta.
- Watson,L. 2011. Corporate Social Responsibility and Taxaggressiveness: An Examination Of Unrecognized Tax Benefits. Diakses dari www.ssrn.com
- Winarsih, P, dan M. S. Kusufi. 2014. Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tindakan Pajak Agresif. Simposium Nasional Akuntansi 17, Lombok, Indonesia, 24-27 September.
- Widiyati, D., Valdiansyah, R. H., Meidijati, M., & Hendra, H. (2021). The Role of Public Accountants in Fraud Prevention and Detection in the Taxation Sector during Covid-19. *Golden Ratio of Auditing Research*, 1(2), 70-82.
- YunusHandoko. 2014. Implementasi Social and Environmental Disclosure dalam Perspektif Teoritis. *Jurnal JIBEKA*, Vol. 8 No.2.
- YustityaAsmaranti. 2011. Implementasi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ui Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 3 No. 1, Januari-Juni.